

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Adanya kerjasama antara produser sawit Indonesia dan Malaysia bersama dengan Menteri perkebunan untuk menghadapi tekanan dari kelompok lingkungan dari pembatasan perluasan lahan sawit, gas rumah kaca, dan lahan gambut pada awal Maret 2010 menunjukkan adanya aliansi dari produser sawit untuk merespon tekanan dari kelompok-kelompok lingkungan. Dalam pemberitaan yang terpisah Menteri Kehutanan menyampaikan kebijakannya yang terbaru yang ingin memasukkan Tanaman Kelapa Sawit sebagai tanaman kehutanan yang maknanya, perkebunan kelapa sawit dapat dipasarkan dalam pasar karbon untuk mempersiapkan diri terhadap pasar karbon pada tahun 2013<sup>1</sup>. Walaupun kemudian rencana tersebut dalam kesempatan terpisah dibantah karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terutama Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, dimana tanaman kelapa sawit tidak termasuk dalam tanaman kayu-kayuan.

Sementara itu, pemberitaan kampanye Greenpeace untuk menghentikan konversi hutan untuk perkebunan dan beberapa permintaan dan tuntutan baik pada IFC maupun pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk mengaudit perkebunan dan perusahaan sesuai dengan standar-standar lingkungan dan sosial dalam RSPO. Dimana baik International Fund Corporation (IFC) dan beberapa perusahaan dan industri, dan *buyer* tergabung mempromosikan industri CPO yang bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan.

Sektor industri sawit<sup>2</sup> telah mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari banyak pihak karena selain merupakan komoditi ekspor terbesar di Indonesia

---

<sup>1</sup> Jakarta Post, 16 February 2010. Indonesia to reclassify oil palm as forest

<sup>2</sup> Industri kelapa sawit di daerah Hindia Timur berkembang dimulai penyebaran tanaman kelapa sawit di Kebun Botani di Buitenzorg, sekarang dikenal sebagai Kota Bogor, di Pulau Jawa pada

namun juga dengan laju ekspansinya sebesar 600.000 ribu hektar per tahun. Usaha komoditi ini mendapatkan dukungan besar dan berdasarkan penelitian memiliki tingkat keuntungan yang sangat besar sehingga di era otonomi, ekspansi perkebunan sawit merupakan rencana besar dalam tata ruang daerah banyak kabupaten terutama di daerah Timur yang masih memiliki lahan yang luas berpotensi menjadi lahan perkebunan. Sebagai komoditi unggulan baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperbesar investasi di perkebunan kelapa sawit dan sekaligus berupaya mengatur kebijakan untuk menjaga kondisi pasar minyak sawit dalam negeri.

Dalam laporan Forest Watch Indonesia tahun 2001<sup>3</sup>, dilaporkan bahwa Sawit adalah salah satu pendorong deforestasi<sup>4</sup>, dalam laporan ini disebutkan bahwa ekspansi yang terbesar setelah blunder yang ketiga yang terjadi pada saat ini telah mencapai titik pertumbuhan yang pesat. Setelah itu telah menjadi pertanyaan besar apakah perkembangan perkebunan sawit yang terjadi menjadi masalah yang terbesar setelah pemberian konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) setelah pemberian konsesi HPH kemudian diikuti oleh ekspansi perkebunan sawit. Sudah menjadi perhatian sejak dahulu bahwa laju luasan perkebunan sawit meningkat pesat.

Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan isu perubahan iklim, industri energi alternatif juga mendapatkan perhatian dimana tanaman kelapa sawit merupakan penghasil biomassa yang tergolong terbesar di antara tanaman komersial yang ada telah menyebabkan reaksi dan perlawanan dari kelompok

---

tahun 1948. Tanaman ini dikenal sangatlah efektif dalam memproduksi minyak. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1875, bibit kelapa sawit dibudidayakan untuk perkebunan. Dalam laporan Teysmann, ketertarikan utamanya adalah untuk mengetahui apakah tanaman kelapa sawit terbukti lebih berguna sebagai penghasil minyak nabati lebih baik dibandingkan tanaman kelapa.

<sup>3</sup> Antara tahun 1967 sampai tahun 2000, perkebunan sawit yang semula hanya seluas 300.000 hektar menjadi 3 juta hektar. Pertumbuhan terbesar di Sumatera, pada tahun tersebut ekspansi dan perluasan sawit menuju ke Kalimantan Barat dan diikuti Sulawesi, dan kemudian Papua.

<sup>4</sup> Deforestasi didefinisikan sebagai konversi atau perubahan lahan hutan alam untuk penggunaan sektor lain selain kehutanan, seperti perkebunan sawit, areal pemukiman untuk transmigrasi, pertambangan, kebakaran hutan dan lain-lainnya. Driver deforestasi didefinisikan sebagai pendorong terjadinya deforestasi.

lingkungan melihat perluasan perkebunan sawit sebagai ancaman terhadap lingkungan dan bumi selain telah menyebabkan persoalan-persoalan sosial.

Berdasarkan kajian PPKS, potensi investasi di Indonesia yang tinggi karena keunggulan komparatifnya. Investasi pada komoditi kelapa sawit sangat potensial baik pada industri hulu, yaitu perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*, CPO) dan minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil*, PKO), pabrik pengolahan minyak sawit (PKS) maupun industri hilirnya. Pemerintah membuat kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang diimplementasi oleh pemerintah dengan dukungan secara langsung dengan melalui perusahaan swasta, perusahaan milik negara maupun rakyat.

Dalam laporan tersebut juga dikaji peluang pengembangan kelapa sawit di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hasil survai yang dilakukan PPKS saat itu menunjukkan sekitar 180 ribu hektar lahan potensial sekitar 5 sampai 10 kilometer sepanjang perbatasan sesuai untuk pengembangan kelapa sawit. Wilayah ini berada di Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Keunggulan utama dan kunci keberhasilan investasi industri kelapa sawit di Indonesia berdasarkan Publikasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2006) adalah pertama, lahan yang sesuai untuk perkebunan sawit tersedia cukup luas, terutama di kawasan timur Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta pulau-pulau kecil mm mm mlainnya. Perluasan perkebunan sawit di daerah tersebut juga sejalan dengan rencana pemerintah setempat dalam mengembangkan pola perkebunan besar swasta nasional (PBSN), Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perkebunan rakyat. Kedua, pengembangan kelapa sawit akan sangat didukung oleh pemerintah terlebih lagi bila dikaitkan dengan program transmigrasi. Ketidakeimbangan antara jumlah penduduk di Jawa dan Bali dengan jumlah penduduk di Kalimantan, Papua dan Sulawesi memungkinkan dilakukannya program transmigrasi dari Jawa-Bali. Ketiga, banyak penemuan dan hasil penelitian yang dapat mendukung keberhasilan investasi di bidang industri kelapa sawit baik dari aspek kultur teknis perkebunan (*Good Agriculture*

*Practice*, GAP) maupun industri hilir. Aneka produk dapat dihasilkan dalam industri kelapa sawit saat ini. Produk turunan kelapa sawit tidak hanya digunakan untuk keperluan pangan, akan tetapi juga untuk keperluan dan produk non-pangan. Keempat, layanan birokrasi untuk mendapatkan izin dari Pemerintah RI yang lebih sederhana, dengan berlakunya undang-undang tentang Otonomi Daerah karena prosesnya menjadi lebih singkat dengan diberikannya kewenangan Bupati atau Walikota untuk memberikan izin investasi.

Lebih lanjut lagi, kunci keberhasilan budi daya kelapa sawit, ditentukan oleh lima faktor utama yaitu 1) faktor kesesuaian lahan, yang ditentukan oleh letak geografis, topografi, elevasi, penyinaran matahari serta ketersediaan air. Dimana dari penelitian Subardja *et al* (2006) lahan yang tersedia dan sesuai untuk perkebunan seluas 26,3 juta hektar yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. 2) menggunakan sarana produksi yang tepat sangat dianjurkan dalam budidaya kelapa sawit. 3) pengelolaan perkebunan dengan manajemen yang baku 4) sumber data manusia dan 5) antisipasi dan pencegahan timbulnya konflik sosial. Yang artinya kondisi lingkungan Indonesia sangat potensial dan dengan adanya peran pemerintah dalam menggalakkan perkebunan, sangat mudah untuk melakukan investasi untuk perkebunan sawit.

Investasi pada perkebunan sawit besar dan juga pada perusahaan-perusahaan kayu secara besar-besaran dimulai pada masa Orde Baru menganut kebijakan pembangunan ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memperbaiki dan mengembangkan ekonomi melalui politik stabilisasi dan kebijakan rehabilitasi ekonomi. Prioritas kebijakan stabilisasi adalah pengontrolan terhadap hiperinflasi, penyesuaian anggaran berimbang, dan membuka ekonomi untuk menyiapkan iklim yang baik untuk investasi asing. Sedangkan kebijakan rehabilitasi ekonomi bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan melalui jalur pembangunan infrastruktur dan skema inisiatif fiskal seperti bantuan yang sentral dan subsidi (Hidayat, 2008). Salah satu pembangunan ekonomi yang menghasilkan devisa yang besar adalah sektor

kehutanan dimana penebangan kayu bundar oleh konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menghasilkan devisa terbesar kedua setelah sektor pertambangan terutama minyak bumi.

Sektor kehutanan pada tahun 2004, menunjukkan bahwa sekitar 69 juta hektar wilayah daratan Indonesia adalah hutan produksi dan masih dalam bentuk hutan terdegradasi. Sementara itu 9,5 juta hektar kawasan hutan dialokasikan untuk konversi menjadi perkebunan sawit. Secara umum trend ini meningkat sejalan dengan menurunnya produksi kayu log, dan larangan ekspor kayu log dan meningkatnya harga CPO dan investasi di perkebunan sawit. Perkebunan skala besar biasanya mencari lahan dan kawasan yang cukup luas sebagai Hak Guna Usaha (HGU) dari wilayah yang dialokasikan untuk dikonversi.

Namun pembangunan yang dilakukan juga sarat dengan konflik lahan hutan dan memiliki implikasi kerusakan hutan. Hal yang sama pun terjadi pada lahan-lahan yang dialokasikan untuk perkebunan. Publikasi Forest Peoples Programme (FPP) dan Sawit Watch (2006) yang bertujuan untuk menguji standar perundingan minyak sawit berkelanjutan, petani sawit mengalami sejumlah hambatan-hambatan teknis untuk menjadi petani independen, menunjukkan sejumlah 30 persen luasan kelola perkebunan sawit di Indonesia dikerjakan oleh petani sawit di bawah berbagai kesepakatan, terbesar sebagai anggota PIR yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) yang dikembangkan pada akhir 1990. Dalam temuan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa petani sawit diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan transaksi yang transparan.

Salah satu problematika pembangunan berkaitan dengan regulasi negara yang lebih mengakomodasi kepentingan investasi atau korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat lokal. Dalam keseluruhan konteks hubungan tripolar antara masyarakat, korporasi dan pemerintah merupakan bagian yang penting untuk melihat kompleksitas masalah pembangunan secara sosiologis. Perlawanan atau resistensi masyarakat karena adanya pengelolaan yang tidak mempertimbangkan masyarakat sebagai penerima manfaat yang adil merupakan

sebuah respon atas ketimpangan hubungan-hubungan tripolar. Dalam kontekstual pembangunan dan global, perlawanan tersebut dapat dengan mudah dianggap sebagai gerakan yang kontra produktif yang sering sekali dianggap menentang pembangunan. Dalam konteks perlawanan yang tidak hanya lokal dan meningkat, resistensi masyarakat mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti hal-nya akademisi, peneliti dan LSM lingkungan. Upaya melakukan perlawanan yang sebelumnya dilakukan untuk masyarakat mendapatkan haknya kembali menjadi sebuah upaya yang berskala lokal, regional dan nasional dan global. Eskalasi kasus sawit yang meningkat, perhatian global terhadap kebakaran hutan tropis yang terjadi mengakibatkan perhatian atas ekspansi sawit dari tingkat lokal maupun global tentang dampak lingkungannya.

Melihat sejarah gerakan lingkungan, sejak awal tahun 80-an, gerakan lingkungan sudah menjadi gerakan yang berkembang terutama menyikapi masalah-masalah lingkungan dan dampak-dampak dari perusahaan-perusahaan besar yang berkembang pesat di masa Orde Baru. Pola gerakan lingkungan yang ada tersebut merespon pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru yang lebih mementingkan pembangunan ekonomi dan tersentralisasi, sementara itu pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam dan lokal tidak mendapatkan perhatian. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Orde Baru didorong oleh aktor-aktor langsung seperti pemerintah dan pengusaha, dan aktor secara tidak langsung seperti lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Internasional Monetary Fund atau IMF, Asian Development Bank atau ADB dan lain-lain), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal.

Sementara itu pola-pola gerakan lingkungan dan alirannya yang ada berdasarkan Aditjondro (2003) adalah gerakan yang melawan investasi besar, gerakan yang menggugat paradigma pembangunan yang kapitalistik dan gerakan yang mendorong perlindungan terhadap kegiatan dan pengetahuan lokal. Pada awalnya, gerakan lingkungan didorong oleh beberapa kelompok mahasiswa dan organisasi non pemerintah yang melakukan kampanye-kampanye menyelamatkan

lingkungan dari ekspansi modal, berubah bentuk menjadi sebuah jaringan yang memiliki kepedulian dan perhatian pada lingkungan. Dan jaringan yang bekerja ini berubah sesuai dengan ruang politik dan kebijakan yang berkembang saat itu.

Sejalan dengan gerakan global yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, gerakan lingkungan di Indonesia berkembang. Pada tahun 1980-an keprihatinan terhadap pembangunan, dan keanekaragaman hayati, menunjukkan perhatian yang besar pada masalah-masalah kerusakan lingkungan akibat pendekatan pembangunan secara umum, terutama pertanian. Namun setelah dampak dari pembangunan kehutanan terungkap di tahun 1990-an, gerakan lingkungan lebih menunjukkan perhatian pada turunan dari masalah-masalah pembangunan di sektor kehutanan, tentunya ini bukanlah hal yang luar biasa mengingat 60 persen dari daratan Indonesia diklasifikasi sebagai kawasan hutan yang berada pada pengawasan dan aturan Undang-undang Kehutanan.

Momentum reformasi di Indonesia adalah tonggak dimana beberapa gerakan seperti gerakan masyarakat adat, gerakan reformasi pembaruan agraria dan sumberdaya alam memiliki peluang besar untuk didorong. Gerakan lingkungan di Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari masalah-masalah pembangunan di lokal yang juga memiskinkan dan tidak mensejahterakan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Secara khusus, gerakan kelompok-kelompok yang mendukung adanya akses dan kejelasan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat juga mendapatkan momentum yang jauh lebih besar, yang juga menunjukkan adanya gerakan partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan adat.

Industri sawit yang berkembang pesat ini memiliki trend perkembangan di wilayah-wilayah yang telah sarat dengan konflik kehutanan. Secara ekonomi dan politik, industri sawit dianggap lebih mampu memberikan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat, atau anggota plasmanya dibandingkan konsesi kehutanan. Tentunya ini merupakan hal yang juga mendorong konflik antara sektor kehutanan maupun perkebunan, sementara itu gerakan lingkungan

mengawasi perluasan sawit agar tidak melakukan konversi di wilayah kawasan hutan yang masih berhutan dan di wilayah masyarakat adat maupun lokal.

Sebagai isu, sawit juga merupakan isu global di mana konsumsi masyarakat eropa dan dunia mendorong peningkatan industri sawit. Sebagai gerakan yang bekerja dalam menyelesaikan masalah pembangunan pengelolaan perkebunan sawit adalah salah satu topik yang menarik dibahas tidak saja karena sifat dan corak peran korporatnya yang bersifat global dan masif dan lebih terorganisir, namun juga investasi besar yang akhir-akhir ini menjadi topik yang kerap dibahas termasuk upaya-upaya untuk masuk dalam pasar karbon. Dalam kampanye global, ancaman kelestarian hutan tropis bukan lagi karena deforestasi akibat *illegal logging* seperti yang sebelumnya terjadi, namun karena perluasan penanaman sawit dan dalam konteks nasional, di Indonesia, tempat yang cukup luas untuk digarap menjadi perkebunan sawit.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dalam kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia, konflik atas pengelolaan hutan terjadi semenjak diterapkannya sistem pengelolaan hutan yang memberikan hak kelola kepada pihak ketiga mengelola dan mengeksploitasi hutan yang menimbulkan masalah dengan masyarakat adat dan lokal yang telah berada di wilayah tersebut. Konflik yang terjadi antara pihak ketiga pengelola kehutanan yang masih berlangsung sampai sekarang. Kebijakan kehutanan Indonesia telah secara legal mendorong praktek ekstraksi sumberdaya 'tebang dan lari' dan gagal menciptakan mekanisme yang efektif untuk menegakkan standar minimum pemeliharaan sumberdaya hutan sekalipun<sup>5</sup>.

Tahapan yang terjadi semenjak sepuluh tahun terakhir adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk peruntukan perkebunan sawit, selain lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan, dari semenjak berlakunya undang-

---

<sup>5</sup> Dalam laporan World Resource Institute (WRI), disebutkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997-1998 merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek tata guna lahan yang telah sekian lama merusak dan menghancurkan kawasan-kawasan hutan Indonesia yang luas, dan menyengsarakan jutaan masyarakat lokal sambil memperkaya sekelompok kecil elit penguasa. Kedua penyebab utama kebakaran berulang yaitu perubahan vegetasi tanah akibat deforestasi, dan praktek penggunaan api untuk membersihkan lahan.



undang kehutanan tahun 1967, pelepasan kawasan hutan juga dilakukan untuk perkebunan baik sawit dan lain-lain dan juga untuk transmigrasi yang berkaitan dengan pemberian lahan tersebut. Konteks kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang demikian mengakibatkan tidak saja hadirnya masalah-masalah lingkungan namun juga konflik sosial karena saat terjadi pelepasan kawasan hutan untuk peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) sawit, sejumlah lahan milik masyarakat lokal yang semula dalam penguasaan masyarakat tersebut dan merupakan kebun karet atau hutan adatnya lenyap dan digantikan oleh tanaman kelapa sawit milik perusahaan besar.

Gerakan lingkungan yang awal mulanya bekerja untuk masalah-masalah lingkungan seperti halnya kehilangan hutan akibat deforestasi dan lain-lain, kebakaran hutan, mulai memusatkan perhatiannya pada perkembangan perkebunan sawit terutama karena dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan alokasi kawasan hutan konversi yang dilepaskan untuk perkebunan sawit dan transmigrasi.

Sebenarnya konflik dengan perkebunan sawit telah terjadi sejak dahulu kala, kasus-kasus yang berkaitan dengan perkebunan sawit selalu ditangani sebagai kasus konflik pertanahan oleh kelompok dan jaringan yang prihatin terhadap kasus pertanahan atau pendamping di pengadilan terutama untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun gerakan lingkungan anti sawit yang dibahas dalam perspektif gerakan sosial dalam penelitian ini adalah sebuah gerakan lingkungan yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Gerakan ini bekerja awalnya pada keprihatinan atas masalah-masalah lingkungan, dan fokus pada isu sawit, tidak hanya pada kasus-kasus tanahnya namun juga pembangunan sawit secara menyeluruh dan dampaknya pada lingkungan dan sosial. Gerakan lingkungan ini adalah sebuah gerakan yang bersifat global yaitu gerakan pembangunan berkelanjutan.

Gerakan lingkungan sebagai gerakan sosial dikenali sebagai gerakan sosial baru yang memiliki karakter khusus dan masuk khasanah keilmuan sosiologi lingkungan dalam subdomain terakhir yaitu teori mengenai tindakan kolektif dan

gerakan sosial (Tindall, 1995 dalam Novrianty, 2006). Hannigan (1995) dalam Novrianty (2006) lebih lanjut lagi menegaskan bahwa dua masalah utama yang telah ada dalam sosiologi lingkungan yaitu penyebab kerusakan lingkungan, dan munculnya kesadaran dan gerakan lingkungan. Yang menunjukkan bahwa teori gerakan sosial berkembang dengan munculnya kesadaran dan gerakan lingkungan dan munculnya gerakan-gerakan lain seperti gerakan perdamaian, gerakan profeminisme, yang mengkritisi gerakan sosial sebelumnya.

Dengan demikian menarik untuk melihat secara akademik tentang gerakan lingkungan sebagai fenomena gerakan sosial dalam kajian sosiologi, mengapa ia muncul dan bagaimana ia bekerja secara empiris. Kajian yang dilakukan ini pada kasus pergerakan terhadap perkembangan dan ekspansi sawit.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana konteks historis gerakan lingkungan anti sawit terbentuk?
- (2) Bagaimana faktor-faktor ideologis berkontribusi terhadap gerakan lingkungan tersebut?
- (3) Apa faktor-faktor yang bekerja dalam proses makro dan mikro gerakan lingkungan anti sawit?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tujuan-tujuan praktis dan tujuan-tujuan teoritis seperti berikut:

- (1) Menggambarkan kemunculan gerakan lingkungan antisawit dan faktor-faktor ideologi yang melandasinya dan bagaimana;
- (2) Menggambarkan faktor-faktor dan proses-proses makro dan mikro yang bekerja dalam gerakan lingkungan keberlanjutan;

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dalam memetakan konflik perkebunan sawit yang kian marak akhir-akhir ini yang disebabkan oleh meningkatnya investasi kepada komoditi ini dan secara teoritis dapat menjelaskan hubungan tripolar negara, korporasi dan komunitas lokal yang menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal dan gerakan yang melawan ekspansi sawit.

Manfaat secara teoritis untuk teori sosiologi adalah studi gerakan sosial baru bukanlah studi yang sering dilakukan, sehingga sangat menarik untuk secara empirik gerakan lingkungan di Indonesia dan menganalisisnya secara akademis dengan mempergunakan konsep gerakan sosial baru yang masuk dalam khasanah keilmuan sosiologi lingkungan. Secara teoritis faktor-faktor yang bekerja dalam proses-proses makro dan mikro yang bekerja dalam gerakan lingkungan merupakan hal yang dibahas dalam dua perspektif atau pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*) maupun Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*).

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah melihat kompleksitas gerakan lingkungan secara empirik dan mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong kemunculannya dan bagaimana gerakan ini muncul dan berkembang sejalan dengan kontekstual perkembangan kebijakan dan peluang politik lingkungan di Indonesia dan global berkaitan dengan isu-isu lingkungan.

### **1.6. Fokus dan Batasan Penelitian**

Peran pendamping dan pelobi dari pihak LSM maupun organisasi masyarakat di tingkat internasional maupun nasional juga sangat menentukan ketajaman dan hasil akhir dari resolusi konflik perkebunan sawit (Afrizal, 2007). Sehingga dalam penelitian ini fokus dari penelitian adalah pada peran-peran dari kelompok dan gerakan pemantauan sawit yang memiliki keanggotaan jejaring dan aliansi yang berada di tingkat komunitas atau akar rumput maupun kabupaten ataupun di nasional maupun internasional dan organisasinya bekerja dalam jangka waktu yang panjang.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi oleh periode waktu dari kemunculan dari gerakan lingkungan dan aktifis-aktifis yang bekerja di isu dan perkembangannya, namun pembahasan tentang capaian dan prosesnya dari kelompok ini tidak terlalu banyak dibahas kecuali yang bertujuan untuk memberikan penjelasan keragaman aksi dan strategi dan pekerjaan dari masing-masing lembaga dan jaringan yang bekerja.

### **1.7. Tahapan Penelitian**

Di Gambar 2 tahapan dari penelitian ini digambarkan (Lihat halaman 13). Proses pemilihan topik berdasarkan pengalaman peneliti bekerja dan berinteraksi dalam aliansi dan dengan jaringan pemantau sawit. Tahapan penelitian ini lebih menggambarkan bagaimana proses pemilihan topik penelitian dan pelaksanaan operasional dari penelitian dilakukan.

Pemilihan kerangka teori berdasarkan telaah peneliti pada subdomain-subdomain pembahasan dalam khasanah keilmuan sosiologi lingkungan. Pendekatan pembahasan gerakan sosial dengan mempergunakan kedua paradigma ini dipilih bertujuan untuk melihat secara empiris tentang unit gerakan sosialnya namun tidak pada dampak dari gerakan lingkungan yang dikaji namun lebih pada mengapa terbentuk dan bagaimana gerakan lingkungan tersebut bekerja.

Gambar 1. Tahapan Penelitian ‘Gerakan Lingkungan Antisawit: Studi Kasus Jaringan Pemantau Sawit’

